

  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
**Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270**

**LAPORAN SINGKAT**  
**RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM (RDPU) PANSUS**  
**RUU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR**  
**21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA**

Tahun Sidang : 2020-2021  
Masa persidangan : V  
Rapat ke :  
Jenis rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua  
Dengan : 1. Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO)  
2. Ketua Forum Komunikasi antar Daerah Tim Pemekaran Papua Selatan.  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, tanggal : Senin, 7 Juni 2021  
Waktu : 10.21 s.d. 12.10 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Pansus B, Gedung Nusantara II lantai 3  
Acara : Masukan dan pendapat terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.  
Ketua Rapat : Komarudin Watubun, S.H., M.H./Ketua Pansus  
Sekretaris Rapat : Endah Sri Lestari, S.H., M.Si/Kabag. Set. Pansus  
Hadir : 1. Hadir 12 anggota dari 30 orang anggota Pansus.  
- 9 hadir fisik  
- 2 hadir virtual  
- 1 Izin  
2. DPD RI  
- Baharuddin Thahir  
3. Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO)  
4. Ketua Forum Komunikasi antar Daerah Tim Pemekaran Papua Selatan

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Kerja Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua di pimpin oleh Ketua Pansus Komarudin Watubun, S.H., M.H.
2. Rapat dibuka pada pukul 10.21 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. **KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT**

1. Permasalahan pembangunan di Tanah Papua sbb:
  - a. Penggunaan Dana Otsus Papua dan Dana Infrastruktur.
  - b. Pemerataan antara OAP dan Non-OAP.
  - c. Perlindungan terhadap lingkungan hidup dan hutan.
  - d. Pengakuan terhadap masyarakat adat.
2. Penggunaan dana otonomi khusus Papua untuk Pendidikan dan Kesehatan belum mampu mendongkrak IPM Provinsi Papua dan Papua Barat.
3. Selama 2010-2019, capaian IPM Provinsi Papua dan Papua Barat terus mengalami peningkatan namun masih dibawah rata-rata Nasional.
4. Infrastruktur masih terbatas, belum menjangkau ke setiap wilayah pelosok.
5. Lemahnya perlindungan terhadap lingkungan hidup dan hutan

III. **PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 12.10 WIB.

  
**KETUA PANSUS**

KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.

A.263